

**RESOLUSI KONFLIK PERTAMBANGAN TIMAH INKONVENSIONAL MELALUI
PENDEKATAN MODAL SOSIAL DI PROVINSI BANGKA BELITUNG
(STUDI KASUS MASYARAKAT KABUPATEN BELITUNG)**

**UNCONVENTIONAL MINING CONFLICT RESOLUTION THROUGH SOCIAL
CAPITAL APPROACH IN BANGKA BELITUNG ISLANDS
(CASE STUDY OF BELITUNG COMMUNITY)**

Amelia Dwi A¹, Bayu Setiawan², Achmed Sukendro³

PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN

(ameliadwi@gmail.com, bayu.setiawan1961@gmail.com, achmedsukendro@gmail.com)

Abstrak – Bangka Belitung sebagai salah satu penghasil timah di Indonesia. Eksplorasi tambang tanpa ijin telah menyebabkan munculnya penambangan timah inkonvensional. Pertambangan ini berimplikasi pada munculnya kerusakan lingkungan dan ketegangan sosial. Ketegangan terjadi antara Pemerintah, kelompok penambang, dan masyarakat sekitar daerah pertambangan sehingga rawan akan konflik. Kebijakan pemerintah dalam menangani konflik pertambangan inkonvensional masih belum optimal. Pendekatan penegakan hukum tidak menyelesaikan akar konflik sehingga konflik terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan modal sosial. Modal sosial adalah nilai dan budaya yang digali dari masyarakat setempat yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran modal sosial masyarakat Belitung dalam upaya memperoleh resolusi konflik pertambangan inkonvensional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di beberapa wilayah. Penelitian ini melihat relasi pendekatan modal sosial yang dapat menjadi perekat, jaringan penghubung, dan jembatan dalam resolusi konflik. Modal sosial digunakan dalam rangka merumuskan resolusi konflik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran dalam usaha mengurangi jumlah konflik hingga penambang inkonvensional di Kabupaten Belitung. Harapannya agar masyarakat memperoleh solusi alternatif yang saling menguntungkan.

Kata Kunci: kebijakan, konflik, pemetaan konflik, pendekatan modal sosial, resolusi konflik

Abstract – Bangka Belitung as one of the tin-producing islands in Indonesia. Illegal mining exploration has led to the emergence of unconventional tin mining which has resulted in environmental damage and social conflict. Conflicts occur between the government, unconventional mining groups, and communities around the mining area. Government policies to prevent unconventional mining conflicts are still not optimal. The law enforcement approach does not solve the root of the conflict. Therefore, a social capital approach is needed. Social capital is the values and culture of local communities that are used to resolve conflicts. This study aims to determine the role of social capital of the Belitung community in solving unconventional mining conflicts. The method in this research is descriptive qualitative with a case study approach in several areas. This study examines the relationship between social capital approaches that can be used as social bonding, linking, and bridging in conflict resolution. Social capital is used in order to optimizing and find effective conflict resolution to reduce conflict and also reduce unconventional miners in Belitung. In the end, social capital can help society to get alternative solution.

Keywords: policies, conflict, conflict mapping, social capital approaches, conflict resolution

Pendahuluan

Indonesia menjadi negara pengekspor timah ke seluruh dunia dan Bangka Belitung menjadi provinsi yang menyumbangkan hasil timah terbesar di Indonesia sejak masa Belanda. Sebagian besar masyarakat Bangka Belitung juga merupakan keturunan pekerja tambang timah. Oleh karena itu, pertambangan timah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Berakhirnya masa Orde Baru menjadi titik awal berkembangnya pertambangan timah rakyat. Pada awalnya pengelolaan penambangan timah di areal kuasa penambangan (KP) ditentukan dan dilakukan oleh PT. Timah Tbk. Selanjutnya baru diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999 yang membuka peluang desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dimana dalam pasalnya berbunyi bahwa pertambangan rakyat dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan dari Gubernur (Salim, 2016).

Realitanya muncul berbagai aktivitas tambang timah rakyat atau dikenal tambang timah inkonvensional/ TI tanpa memiliki izin dalam mengelola dan mengeksploitasi timah secara bebas.

Kebanyakan pemilik tambang adalah perorangan atau masyarakat sekitar tambang yang tidak memiliki izin untuk menambang.

Tahun 2004-2006 tambang timah pernah mencapai 17.000 unit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan (Rahayu, 2012). Direktur WALHI Babel, Jessi Amundian mengatakan bahwa aktivitas tambang inkonvensional jelas melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009, UU Minerba No.4 tahun 2009, dan UU Kehutanan No.41 tahun 2009. Selain itu, akibat pertambangan timah, Bangka Belitung juga kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektar dalam waktu 10 tahun. Akibatnya, fungsi ekologis lingkungan terancam keberlanjutannya (Mahendra, 2017).

Isu kerusakan lingkungan, kesehatan, dan sosial masyarakat disekitar daerah dengan aktivitas pertambangan inkonvensional lama-kelamaan telah memicu ketidakpuasan masyarakat dan menimbulkan konflik. Pemetaan konflik di 5 (lima) kecamatan di Belitung yaitu Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Badau dan Selat Nasik menunjukkan potensi konflik terhadap sumber daya timah.

Daerah dengan kerentanan tertinggi terjadi di daerah Tanjungpandan sebagai pusat kota serta Sijuk dengan potensi konflik antara kelompok penambang dan masyarakat disekitar daerah tambang. Puncaknya tahun 2019 terjadi penyerangan terhadap wakil gubernur Babel oleh penambang TI di wilayah Kecamatan Sijuk serta bentrokan dengan satpol PP. Selain itu terdapat pengancaman menggunakan senjata tajam terhadap warga disekitar tambang yang ingin menutup kegiatan pertambangan inkonvensional di beberapa wilayah lain.

Konflik memang dikenal sebagai suatu peristiwa atau aktivitas. Konflik juga didefinisikan sebagai sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan (Miall, 2000). Konflik menjadi suatu situasi di mana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dari masing-masing pihak.

Pertambangan inkonvensional menjadi salah satu sumber potensi konflik. Di beberapa tempat rawan, pertambangan inkonvensional masih

beroperasi dan ditolerir oleh masyarakat sekitar. Fenomena ini menunjukkan bahwa disatu sisi masyarakat memiliki kemampuan atau modal untuk menahan diri agar tidak terlibat maupun menciptakan konflik dilapangan.

Secara faktual, pendekatan penegakan hukum pada umumnya telah dilakukan namun belum mampu menyelesaikan akar konflik pertambangan. Oleh karena itu, pendekatan modal sosial perlu digunakan disamping kebijakan dari lembaga yang kaku dan tidak tepat sasaran. Modal sosial diartikan sebagai aspek-aspek dari organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerja sama untuk mendapatkan manfaat bersama (Putnam, 1993).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara upaya resolusi konflik dengan modal sosial masyarakat seperti Jurnal Penyelesaian Konflik dengan Modal Sosial Dalam Pembangunan Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Jurnal ini memaparkan bahwa dalam proses pembangunan desa wisata tidak bisa lepas dari dinamika konflik.

Salah satu cara untuk mengurangi atau mengeliminasi konflik adalah dengan menggunakan eksistensi modal sosial yang ada dalam masyarakat. Entitas modal sosial dalam penelitian ini dilihat dari aspek partisipasi dalam suatu jaringan, reciprocity, trust, nilai, norma yang ada di masyarakat setempat.

Tujuan peneliti menulis artikel adalah untuk menganalisa terkait dinamika konflik pertambangan timah inkonvensional baik latar belakang, aktor, maupun hubungannya, melihat kebijakan Pemerintah dalam menghadapi konflik serta menganalisis peran dan kontribusi pendekatan modal sosial dalam resolusi konflik pertambangan timah inkonvensional pada masyarakat di Kabupaten Belitung.

Pendekatan modal sosial yang digali dari dan oleh masyarakat itu sendiri dapat menjadi jembatan dalam melahirkan pola komunikasi dan pola interaksi yang lebih baik sehingga menumbuhkan perasaan saling memahami dalam upaya resolusi konflik dan membangun perdamaian. Selain itu, resolusi konflik dengan pendekatan modal sosial diharapkan dapat memberikan solusi agar konflik tidak mengarah pada konflik kekerasan komunal dimasa yang akan datang serta

memberikan pilihan dalam menyelesaikan konflik secara damai dengan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik berbasis pada nilai dan ciri khas masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai proses penyelesaian konflik dengan pendekatan modal sosial. Penelitian kualitatif dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1997: 63).

Adapun pendekatan *case study* atau studi kasus adalah penelitian menggunakan studi kasus yang memungkinkan untuk menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu. Hal yang membedakan pendekatan studi kasus dengan jenis

pendekatan kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik.

Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula. Peneliti kemudian melakukan generalisasi dan membandingkan bagaimana keadaan ideal dan fenomena yang terjadi dilapangan pada akhir kajian (Yin, 2009).

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mewawancarai para ahli, praktisi dan pemangku kebijakan yang secara umum bertempat di Kabupaten Belitung. Adapun Kantor dan Instansi yang akan menjadi tempat penelitian sebagai berikut:

- 1) Dinas Kesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial Kabupaten Belitung untuk memperoleh data tentang dinamika konflik dan Kebijakan Pemerintah dalam menangani konflik pertambangan timah inkonvensional.
- 2) Komunitas Pelestari Budaya Belitung, Pengelola Geosite Juru Seberang, Tokoh Adat, Sejarahwan dan

Budayawan, serta perwakilan penambang timah untuk menggali modal sosial dalam upaya resolusi konflik pertambangan.

Daftar instansi dan praktisi diatas menjadi rujukan dalam penelitian hal ini dikarenakan narasumber-narasumber yang akan diwawancarai terlibat secara langsung maupun tidak langsung serta memiliki peran yang penting terhadap upaya resolusi konflik pertambangan inkonvensional yang ada di Kabupaten Belitung.

Hasil dan Pembahasan Dinamika dan Pemetaan Konflik Pertambangan Timah Inkonvensional

Hasil pemetaan konflik di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Belitung menunjukkan adanya kecenderungan konflik yang bersumber dari faktor ekonomi khususnya berkaitan dengan pertambangan timah inkonvensional. Hal ini karena timah menjadi persoalan dan pertentangan antara mata pencaharian kelompok penambang timah inkonvensional dengan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan yang legal untuk menjamin lingkungan dan kehidupan serta masyarakat yang merasakan dampak pertambangan.

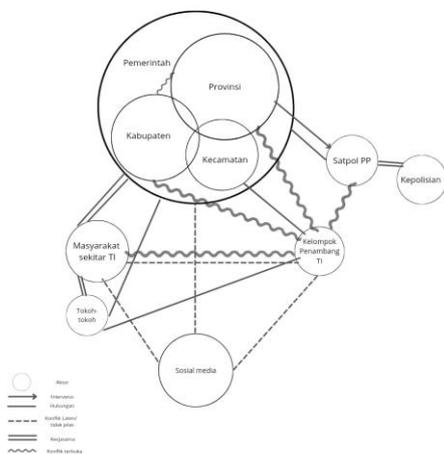
Kasus ketegangan sosial akibat pertambangan timah inkonvensional muncul hampir diseluruh wilayah dengan kerawanan tertinggi di wilayah Kecamatan Tanjung Pandan dan Sijuk. Konflik pertambangan inkonvensional berasal dari persepsi atau sudut pandang mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) terkait pertambangan. Penambang merasa berhak mengelola atau memperoleh manfaat dari bumi tanah kelahiran dan masyarakat dalam batas tertentu masih memberikan pemakluman. Namun, apabila muncul kerusakan dan mengganggu kehidupan masyarakat percaya bahwa tindakan pertambangan sudah berlebihan dan perlu untuk dihentikan.

Adapun kronologi konflik pertambangan inkonvensional yang pecah hingga muncul aksi anarkisme pada wilayah tambang seperti di Tanjung Pandan dan Sijuk disebabkan karena adanya penertiban alat pertambangan tanpa pemberitahuan atau peringatan sebelumnya. Hal ini dianggap penertiban secara diam-diam karena kegiatan pertambangan timah inkonvensional sedang tidak beroperasi atau tidak dalam razia tangkap tangan.

Secara subjektif juga terdapat adanya arogansi dari aparat penegak hukum yang melakukan pembakaran terhadap alat-alat milik masyarakat tanpa konfirmasi lebih lanjut. Ditambah hal tersebut menyebar luas dimedia sosial sehingga menimbulkan percikan emosi dari masyarakat penambang yang merasa dirugikan. Konflik pertambangan timah inkonvensional juga terjadi karena penertiban dilapangan kurang berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten serta desa sehingga konflik yang timbul tidak bisa dicegah.

Hal ini karena surat tugas inspeksi langsung dikeluarkan oleh Pemerintah daerah provinsi tanpa memperhatikan atau berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Sedangkan pada kecamatan Tanjung Pandan, konflik terjadi karena kegiatan eksploitasi telah berlebihan dan penambang yang melakukan aktivitas tambang inkonvensional bukan berasal dari daerah tersebut serta dinilai tidak ada komunikasi dengan masyarakat atau tokoh sekitar. Oleh karena itu, konflik pertambangan timah inkonvensional yang timbul seringkali muncul akibat adanya miskomunikasi atau tidak adanya koordinasi dari pihak-pihak yang ada didalamnya.

Konflik sebenarnya masih dapat dicegah dan diredam dengan pendekatan diakar rumput. Konflik yang terjadi juga disayangkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh setempat karena terjadi kelalaian dalam sistem hubungan sosial masyarakat Belitung yang rukun. Pemetaan konflik pertambangan timah inkonvensional secara umum dapat dilihat dalam bagan berikut:



Gambar 1. Pemetaan Aktor Konflik
Sumber: Peneliti, 2021

Ukuran lingkaran menunjukkan besarnya pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kecamatan dimana wilayah terjadinya konflik. Selain itu, terdapat masyarakat dan kelompok penambang timah, tokoh masyarakat serta aparat penegak hukum.

Garis yang bergelombang menunjukkan adanya konflik terbuka

atau hubungan yang tidak baik antar aktor. Garis lurus adalah adanya hubungan dan koordinasi serta garis putus-putus yang melambangkan konflik laten atau hubungan yang masih belum jelas. Dua garis lurus adalah tanda bahwa masing-masing aktor bekerja sama dalam menghadapi konflik pertambangan inkonvensional.

Kebijakan Pemerintah Dalam Konflik Pertambangan TI

Kebijakan Pemerintah dalam konflik pertambangan inkonvensional memiliki peran dan upaya berbeda tergantung dengan instansi yang terlibat didalamnya. Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam demi kepentingan publik. Sejauh ini, apabila terjadi aduan atau laporan masyarakat terkait kegiatan pertambangan inkonvensional maka dinas lingkungan hidup akan melayangkan surat dan berkoordinasi

dengan satpol pp untuk meminta pendampingan dalam memberikan peringatan serta pendekatan secara sosial.

Kemudian apabila himbauan dan peringatan agar masyarakat berhenti melakukan aktivitas tambangnya diabaikan sebanyak tiga kali maka apabila tertangkap tangan aparat berhak mengamankan alat serta memproses kelompok yang melakukan pertambangan inkonvensional. Namun, jika saat penertiban terjadi konflik di daerah pertambangan maka penghentian konflik dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Penghentian konflik pertambangan timah inkonvensional dimaksudkan untuk memisahkan pihak yang berkonflik baik antar masyarakat dan aparat yang berhadapan dengan kelompok penambang. Setelah itu, baru kesbangpol bersama instansi terkait termasuk dinas sosial, dinas lingkungan, pejabat ditingkat kecamatan, serta tokoh-tokoh adat, agama serta masyarakat secara bersama-sama difasilitasi dalam upaya penyelesaian konflik baik sesuai aturan maupun nilai yang disepakati bersama.

Dari sini dirumuskan berbagai konsensus untuk menemukan resolusi

konflik bagi pihak-pihak yang terlibat. Setelah terdapat solusi, masing-masing pihak menjadi pengawas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keputusan yang ada. Resolusi konflik diharapkan tidak hanya menyelesaikan konflik kekerasan yang ada di lapangan tetapi juga mencari solusi atas maraknya aktivitas pertambangan.

Pemerintah melalui instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Sosial, Kesbangpol bersama-sama masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mengelola tambang dengan lebih bijak. Program pendampingan untuk pengalihan sektor mata pencaharian masyarakat dari tambang ke non tambang seperti eks tambang yang dijadikan lahan perikanan, dibukanya perkebunan, serta tempat wisata.

Program ini sudah berjalan, meskipun lambat dan beberapa masyarakat masih acuh tapi pemerintah terus membangun komunikasi dan berusaha menunjukkan bahwa sektor ini akan lebih baik bagi lingkungan maupun mengurangi resiko keselamatan bagi masyarakat itu sendiri. Sektor ini bisa menghasilkan pemasukan yang besar jika masyarakat tekun dan mau bekerja sama membangun usaha dari hulu ke hilir.

Kegiatan pendampingan ini memang tidak mudah serta terdapat beberapa hambatan. Mulai dari terbatasnya jumlah program maupun tidak mudah mengubah persepsi masyarakat terhadap tambang timah sebagai mata pencaharian utama. Tetapi, dengan diberikan pengertian, pendampingan, dan pengawasan secara terus menerus beberapa kelompok ada yang berhasil.

Keberhasilan ini bisa dicapai dengan melibatkan tokoh-tokoh disekitar maupun memahami karakter masyarakat itu sendiri. Karakter masyarakat Belitung biasanya ingin melihat hasil dahulu sehingga perlu didukung. Nantinya jika sudah melihat beberapa orang berhasil dengan perikanan atau kebun, perlahan masyarakat akan sadar dan mengikuti langkah-langkah serupa tanpa adanya pemaksaan untuk berhenti menambang.

Pencegahan potensi konflik pertambangan inkonvensional juga dilakukan dengan memanfaatkan intel baik dari polisi, tni, maupun dinas. Intel ini yang akan menggandeng tokoh-tokoh sekitar untuk bermusyawarah perihal kegiatan pertambangan. Konflik yang pecah biasanya terjadi jika tidak ada koordinasi dengan tokoh setempat

ataupun penertiban yang dianggap kelompok penambang tidak sesuai dengan SOP seperti tanpa peringatan, kegiatan tambang tidak sedang beroperasi, maupun adanya pengrusakan alat.

Jika kegiatan tambang diamankan, biasanya masyarakat akan taat dan menandatangani perjanjian untuk tidak mengulangi. Dari proses ini biasanya sekaligus dilakukan penyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat untuk mengelola atau membuka sektor usaha lain. Meskipun sulit dan tetap ada oknum yang kembali menambang tapi pelan-pelan perlu terus dilakukan agar angka penambang inkonvensional tidak meningkat secara signifikan.

Modal Sosial dalam Resolusi Konflik Pertambangan TI

Pertambangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bahkan menjadi mata pencaharian turun temurun. Tetapi, bukan berarti tidak bisa dicegah melainkan perlu upaya lain dengan melihat kebutuhan serta kembali pada norma atau nilai yang dahulu telah mengatur kehidupan masyarakat sehingga masih bisa bertahan hingga sekarang.

Nilai-nilai ini mungkin mengalami degradasi tetapi masih bisa dioptimalkan untuk mencegah pertambangan inkonsional dan menekan dampak lingkungan maupun potensi konflik. Modal sosial menurut Cox adalah suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk kebijakan bersama (Cox, 1995). Kemudian dimensi modal sosial tumbuh di dalam suatu masyarakat yang di dalamnya berisi nilai dan norma serta pola-pola interaksi sosial dalam mengatur kehidupan keseharian anggotanya.

Hal ini sejalan dengan jaringan, nilai, dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat setempat baik oleh Pemerintah, kelompok penambang maupun masyarakat disekitar tambang. Masyarakat yang memiliki modal sosial dapat bekerja sama, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Pendapat ini diperkuat oleh Woolcock yang menyebutkan modal sosial dapat menjadi *social bonding* (perekat sosial), *social bridging* (jembatan sosial), dan

social linking (jaringan sosial) (Woolcock, 2004).

Konflik yang dilatarbelakangi persoalan ekonomi terkait akses sumber daya timah dan lingkungan memungkinkan antarpihak yang berkonflik menyertakan identitas-identitas tertentu (agama, etnis, profesi). Identitas inilah yang selanjutnya menjadi pembeda yang membedakan kelompok yang satu dengan kelompok lainnya serta semakin menguat ketika dibenturkan dengan kepentingan *in group* dan *out group*.

Persoalan berikutnya, bagaimana perbedaan-perbedaan ini dapat dijadikan sebuah spirit bagi kelompok-kelompok yang ada, sehingga dari dalam kelompok tersebut muncul nilai, persepsi, kultur maupun yang dapat dijadikan sebagai acuan dan kesepakatan bersama diantara kelompok yang ada. Oleh karena itu, modal sosial menjadi cara untuk menyatukan persepsi Masyarakat Belitung melalui *social bonding*.

Setiap orang Belitung memiliki darah penambang. Tetapi tidak semuanya harus menambang. Diperlukan kebijaksanaan dan pendekatan nilai-nilai seperti pentingnya menjaga hutan yang disebut hutan

riding, menguatkan peran tokoh masyarakat yang disebut ketib, dan merekatkan persaudaraan melalui kegiatan adat yang ada seperti begalor, marastaun, dan pemanfaatan kelekak.

Kegiatan pertambangan boleh dilakukan asal dilahan yang tepat. Jika sudah berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar berarti sudah berlebihan dan kebijaksanaan masyarakat perlu dikembalikan dengan berdasar pada norma yang ada. Masyarakat yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi atau jika tidak berhenti bisa mendapat *karma kelak* atau nantinya *hidup tidak semperene* (hidup tidak tenang karena merusak alam dan mengganggu kehidupan orang lain)".

Social bounding ditandai dengan adanya karakteristik atau ikatan yang kuat (perekat sosial) dalam suatu sistem masyarakat. Misalnya rasa kekerabatan yaitu menyebabkan adanya rasa empati/kebersamaan. Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik kebudayaan yang mereka percaya.

Identitas masyarakat Belitung juga tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Melayu. Hal ini karena mayoritas suku yang mendiami Pulau Belitung adalah suku Melayu.

Keberadaan suku Melayu tersebut identik dengan Islam. Artinya, Islam sebagai ideologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Melayu. Hal ini tercermin dari perilaku dan pandangan hidup masyarakat Melayu yang memegang teguh prinsip dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan.

Ajaran Islam telah menjadi jiwa dalam berbagai bentuk perilaku sosial dan budaya masyarakat Melayu. Identitas keislaman yang melekat pada masyarakat Melayu tersebut, secara tidak langsung berkontribusi positif dalam membentuk karakter masyarakat Melayu pada umumnya.

Dalam konflik pertambangan timah inkonvensional masyarakat telah dan mau diajak untuk bertemu sesuai dengan karakter melayu dan prinsip ajaran agama dalam menyelesaikan konflik. Prinsip dimana masyarakat menganut pentingnya "base muke kan" atau dalam penyelesaian masalah harus muka atau wajah bertemu wajah maksudnya bertemu secara langsung.

Pendekatan lain yang juga digunakan agar masyarakat berhenti konflik adalah prinsip "malu ne besakat same sedare". Prinsip ini berperan sebagai *social bridging* atau jembatan sosial. *Social bridging* merupakan suatu

ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya.

Jembatan ada untuk menghadapi berbagai macam kelemahan disekitarnya, sehingga prinsip ini muncul untuk mengatasi kelemahan dari konflik pertambangan inkonvensional yang sering terjadi. Tujuannya adalah mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar masyarakat mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan membentuk kerjasama.

Beberapa konsensus yang diperoleh yaitu daerah tambang inkonvensional dihadapkan pada opsi yang pertama legalkan kegiatan pertambangan tersebut atau diberikannya alternatif pekerjaan lain bagi penambang. Apabila tidak dilegalkan dan ingin menghentikan aktivitas kegiatan pertambangan inkonvensional maka tempat tersebut perlu dibuka menjadi tempat publik atau dijadikan objek wisata.

Hal ini agar wilayah tersebut menjadi ramai dan mendapat perhatian dari masyarakat yang lebih luas sehingga kelompok penambang sendirinya akan muncul rasa malu akibat melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan

aturan atau disebut "malu/masam muke".

Nilai-nilai lokal dapat tumbuh dari adanya beberapa nilai dan kearifan lokal yang masih bertahan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga bisa menjadi pendekatan modal sosial dalam upaya resolusi konflik. Hal ini bisa menjadi *social linking* (hubungan/jaringan sosial) atau hubungan sosial yang dikarakteristikan dengan adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat.

Langkah pertama musyawarah mufakat dalam tradisi Maras Tahun. Tradisi Maras Tahun di Belitung menempatkan peran dukun kampung sebagai pranta adat dan peran Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya sebagai pranata desa yang saling membentuk hubungan simbiosis-mutualistik dalam memantau, mengontrol, memfasilitasi potensi konflik dan lain-lain dan berasaskan musyawarah-mufakat, menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat kampung.

Proses dan mekanisme adat musyawarah dalam Maras Tahun dengan memberi ruang bagi semua elemen masyarakat untuk terlibat secara

langsung dalam menyampaikan berbagai masalah, keluhan, saran/masukan yang bersifat konstruktif, secara tidak langsung akan mendukung dan menguatkan harmoni sosial di masa akan datang.

Dalam kegiatan pertemuan lain, masyarakat Belitung melestarikan dan memegang prinsip Tradisi begalor yang dapat menjadi upaya membangun komunikasi dalam resolusi konflik. Begalor dalam bahasa Melayu Belitung berarti bercerita tentang hubungan keluarga atau kekerabatan. Istilah lainnya silaturahmi yang memungkinkan untuk saling mengenal antar sesama anggota kerabat satu dengan anggota kerabat lainnya. Budaya begalor dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik antar sesama, khususnya antar sesama kerabat. Sebab, melalui begalor antara satu dengan lainnya dapat saling mengetahui garis keturunan di atas maupun di bawahnya hingga beberapa generasi.

Begalor dapat memanfaatkan berbagai momentum seperti perayaan pernikahan, selamat, kematian, kelahiran, syukuran, hari-hari besar Islam, Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain. Momentum perayaan adalah

kesempatan paling terbuka untuk berkumpul bersama, bercengkrama, beramah tamah penuh dengan nuansa keakraban dan santai.

Begalor tidak hanya dipahami dalam arti sempit, terbatas pada sesama kerabat, tetapi dapat dikembangkan ke arah yang lebih luas, yaitu mengikat persaudaraan antar sesama tetangga, kawan, dan orang lain yang baru dikenal. Dalam praktiknya, begalor tidak hanya dikenal di kalangan kaum tua, namun juga dikenal di kalangan muda bahkan anak-anak tingkat sekolah dasar. Dari begalor inilah muncul nilai bahwa semua masyarakat Belitung “agik urang dirik”, “agik seperenggu” atau “agik besedare”.

Begalor berdasarkan dapat menjadi wadah untuk membantu pihak-pihak yang merasakan situasi konflik yang mereka alami sebagai sebuah situasi zero-sum (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain) agar berubah melihat konflik sebagai keadaan nonzero-sum (di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya dapat sama-sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak-pihak yang bertikai berpindah ke arah hasil yang positif.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Bagian Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adapun kesimpulan yang diperoleh, yaitu konflik pertambangan inkonvensional yang terjadi di Kabupaten Belitung penting untuk diperhatikan baik konflik terbuka maupun yang masih bersifat laten. Konflik terbuka terjadi karena adanya kebijakan yang belum optimal, miskomunikasi, maupun kelalaian dari tokoh setempat serta instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dini konflik. Sedangkan konflik laten berasal dari kegiatan pertambangan timah inkonvensional yang masih banyak dilakukan sehingga menyebabkan kerusakan alam dan menimbulkan keresahan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah baik di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten bersama masyarakat sekitar harus saling bersinergi dalam memberikan peringatan serta pendekatan dengan menggunakan modal sosial masyarakat.

Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dan penyelesaian konflik dengan modal sosial. Penyelesaian ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pendekatan nilai kemasyarakatan.

Seluruh unsur masyarakat dilibatkan dan bertemu langsung untuk membangun komunikasi serta menemukan solusi dari permasalahan pertambangan timah inkonvensional.

Pendekatan modal sosial menekankan pada fungsi nilai-nilai sebagai *social bounding*, *social bridging*, dan *social linking* dalam upaya resolusi konflik pertambangan timah inkonvensional. Nilai ini diantaranya berusaha membangun kesadaran manusia untuk bertanggung jawab terhadap sesama serta lingkungan sesuai dengan ajaran agama. Nilai dalam pengelolaan hutan dengan adanya mitos serta upacara adat. Selain itu, memperkuat jaringan masyarakat dengan memperkuat peran tokoh-tokoh setempat dengan adanya keharusan meminta izin sebelum melakukan aktivitas tambang. Di sini tokoh adat diharapkan memberikan wejangan bahwa tempat tersebut tidak boleh diganggu atau jangan dirusak sambil berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menawarkan alternatif pekerjaan lain kepada masyarakat selain menambang.

Terdapat beberapa saran dan rekomendasi praktis yang didapatkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung harus mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua elemen masyarakat untuk menjaga kondisi yang kondusif terkait pertambangan inkonvensional
2. Penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pelestarian nilai lokal seperti bemusywarah adat melayu, kelekak, hutang iding dan memastikan nilai serta perangkat adat terpelihara dengan baik;
3. Pentingnya pendidikan muatan lokal tentang pertambangan bagi generasi penerus agar lebih bijak memilih pekerjaan selain tambang dimasa yang akan datang;
4. Perlunya kajian tentang pendekatan modal sosial yang lebih mendalam untuk menggali nilai-nilai lain dalam upaya penyelesaian konflik.
5. Advokasi kepada masyarakat tentang peran serta pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat di Belitung untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik dalam semua segi kehidupan.

Daftar Pustaka

Cox, Eva. (1995). *A Truly Civil Society*. ABC Book, Sydney.

Mahendra. (2017, September 25). Antara Babel. Retrieved from Walhi Bangka Belitung Dorong Presiden Moratorium Tambang Timah: <https://babel.antaranews.com/berita/64810/walhi-bangka-belitung-dorong-presiden-moratorium-tambang-timah>.

Miall, R., dan Haouse, W. (2000), *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Trj. Satrio, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal. 7-33.

Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 19–29.

Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*, 13(Spring, 1993), 35–42.

Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Rafaella Nanetti (1993) *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Rahayu, Derita Prapti. (2012). Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal MMH*, Jilid No. 4, Oktober 2012.

Salim, Zamroni, Ernawati Munadi. 2016. *Info Komoditi Timah Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Jakarta Selatan: Imprint Al-Mawardi Prima.

Woolcock, Michael. (2004). *Using Social Capital: Theory and Practice of*

Economic Development Princeton,
NJ: Princeton University Press
(Forthcoming).

Yin, Robert.K.. 2011. Studi Kasus Desain
dan Metode. Jakarta: Rajawali
Press